

## **ABSTRAK**

### **KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh,  
Zalwa Anis Sofiya**

Pokok masalah penelitian ini adalah Kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pokok masalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam beberapa sub masalah atau pernyataan penelitian yaitu, Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jenis penelitian ini tergolong Kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Normatif, adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, skunder dan tersier, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif yang memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum diarahkan guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa kedudukan dan Kewenangan camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu kecamatan tidak lagi merupakan satuan kekuasaan pemerintah, melainkan sebagai suatu wilayah kerja atau pelayanan, status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan , camat tidak lagi berkedudukan sebagai kwpala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintahan pusat dalam menjalankan tugas tugas desentralisasi.

Kata Kunci: CAMAT, KEDUDUKAN, KEWENANGAN, UU NO 23 TAHUN 2014

## **ABSTRACT**

### **THE POSITION AND AUTHORITY OF THE SUB-DISTRICT HEAD IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT ACORDING TO LAW NUMBER 23 OF 2014**

**By,  
Zalwa Anis Sofiya**

*Difference position and authorritys and duties head According law no 23 of 2014 about local governement in the district as well as barries and evercoming abstrackes encontered in the districk head position and distric the spefication of this study is to provide a discreption that gives an overview of the statues and taks head acording to law number 23 year 2014 about the local ggovernement,*

*Governement managemen frame work in authority frame work rilies on 3 exspecial , dezentralitation medebewind, in the united state coridor, dekonsentralisasi is of said have to fill and strengthen each other, dekonsentrasi is ofen said have trategice function to unify the Republic of Indonesia, unfortunately the regulation of dekonsentrasi management is minimum grade, this condition has been aportunatly generating many problems so that central governement have to give seriouse attention trought reliashing regular of policy in synergizing function, institution and program in dekonsentrasi managemen so that it can wals as goals.*

*A change of centralized and desentralized goverenmen system, marked by the issuance of law 23 of 2014 an regional governement. The change can bee send from th sift of statues and position in the whol formationof local goverenmen system*

*Keyword: Sub- district head, position, authority, law number 23 of 2014*